

SKRIPSI

ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI BANJARBARU



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh

TEDY SEPTIAWAN

NIM. 1610211610177

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

**ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI BANJARBARU**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JANUARI, 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tedy Septiawan

NIM : 1610211610177

Tempat/Tgl. Lahir : Jejangkit, 06 September 1998

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul

“ Analisis Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dikaitkan Dengan Larangan Pertambangan Di Banjarbaru”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 9 May 2023

Yang membuat pernyataan,



Tedy Septiawan

NIM 1610211610177

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dikaitkan Dengan Larangan Pertambangan Di Banjarbaru

Diajukan Oleh

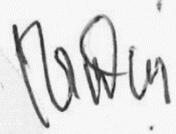
Tedy Septiawan
NIM 1610211610177

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat 17 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP : 197506152003121001


Risni Ristiawati, S.H., M.H
NIP 198112122005012003

Diketahui :
Banjarmasin ,17 Februari 2023
Ketua Program


MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dikaitkan Dengan Larangan Pertambangan Di Banjarbaru

Diajukan Oleh

Tedy Septiawan
NIM 1610211610177

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 131/UN 8.1.11.1SP/2023

Tanggal : 15 MAR 2023



Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at 17 Februari 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

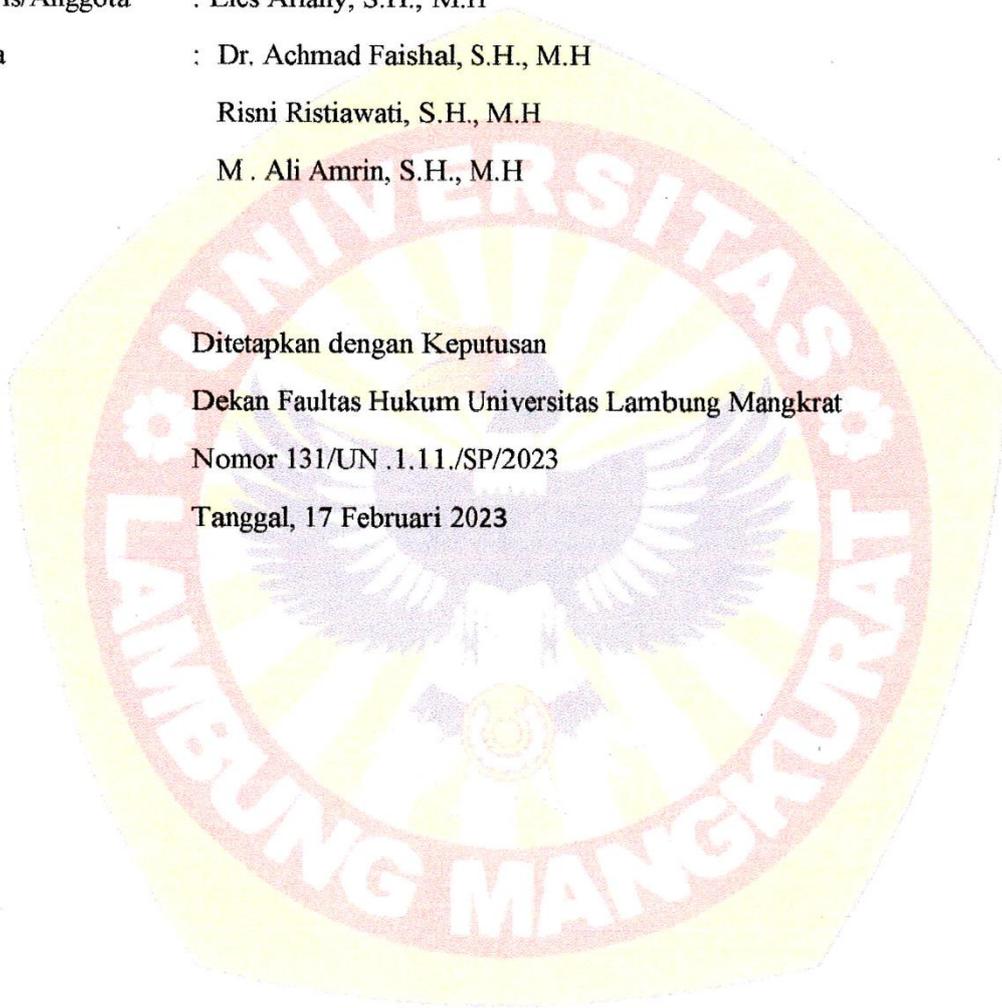
Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina , S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
Risni Ristiawati, S.H., M.H
M . Ali Amrin, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 131/UN .1.11./SP/2023

Tanggal, 17 Februari 2023



ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI BANJARBARU

TEDY SEPTIAWAN

ABSTRAK

Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Apakah di Banjarbaru melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap penambangan yang Berlingdung terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Jenis penelitian yang Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul”. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum”. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang saling bertentangan

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, Kota Banjarbaru sendiri ada larangan untuk penambangan pada peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, jadi pada penelitian ini terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Banjar Nomor 9 Tahun 2011 . pada kasus seperti ini maka digunakan lah *Asas lex superior derogate legi inferiori* Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Kedua, Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Kata Kunci Izin, Penggunaan Pemanfaatan Tanah,

RINGKASAN

ANALIS TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERTAMBANGAN DI BANJARBARU

(Tedy Septiawan, 2023 : 61 Halaman)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral yang cukup besar¹. Potensi sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta harus memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan tersebut adalah. Dalam proses pengambilannya memiliki proses dan prosedur yang panjang yaitu yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang membutuhkan kawasan hutan, baik yang berasal dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, berbagai masalah timbul akibat kegiatan pertambangan mulai dari munculnya berbagai penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, terjadinya pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan punahnya beberapa flora fauna yang menjadi karakter daerah setempat.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Dengan kewenangan ini kasus-kasus besar yang belum selesai di KPK bukan tidak mungkin akan dihentikan dimasa yang akan datang, Legislasi itu justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-1/2003 tanggal 30 Maret Tahun 2004 Salah satu pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi ialah pasal 40 ihwal larangan KPK menerbitkan SP3. Permohonan tersebut ditanggapi oleh MK SebTerkait pelaksanaan program dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, saat ini dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak area lahan ekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kewajiban perusahaan pertambangan dalam

¹ Reno Fitriyanti, 2016, Pertambangan Galian C: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi, Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 34

memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur dan pasca tambang telah diatur secara tegas dan lugas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang saling bertentangan

Hasil penelitian ini adalah: 1. Kota Banjarbaru sendiri ada larangan untuk penambangan pada peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, jadi pada penelitian ini terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Banjar Nomor 9 Tahun 2011 . pada kasus seperti ini maka digunakan lah *Asas lex superior derogate legi inferiori* Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. 2. Pada Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Dikaitkan Dengan Larangan Pertambangan Di Banjarbaru”

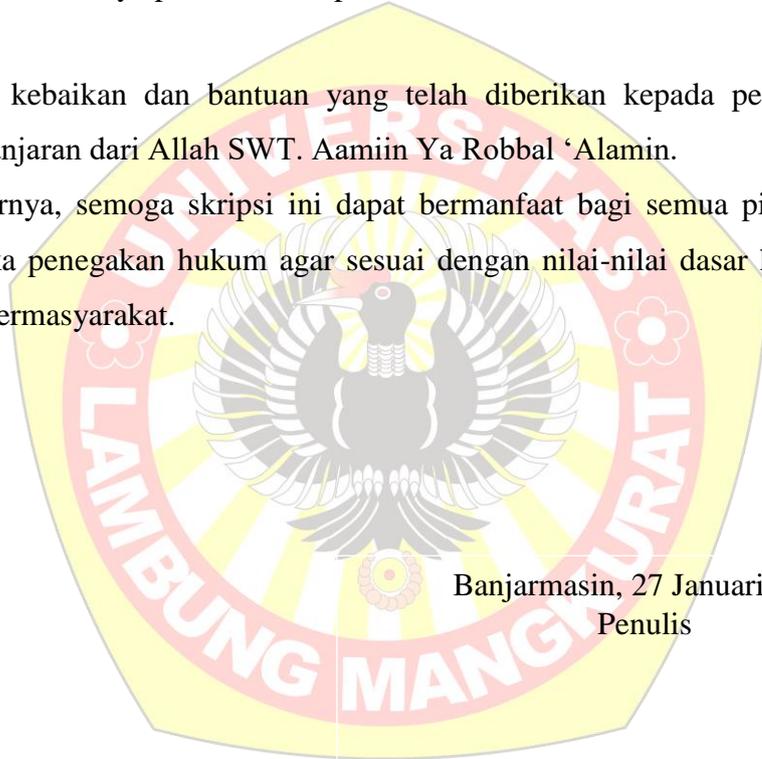
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

- a. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- b. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- c. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- d. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
- e. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini serta dosen yang sangat di hormati;
- f. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- g. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan;

- h. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Umum, Akademik, Perpustakaan dan bagian Kemahasiswaan. Sahabat dekat penulis, yang selalu membantu, menghibur dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini bersama-sama
- i. Teman-teman Angkatan 2016 Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.



Banjarmasin, 27 Januari 2023
Penulis

Tedy Septiawan

NIM. 1610211610177

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	8
3. Tipe Penelitian	8
4. Jenis Bahan Hukum	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertambangan.....	12
B. Galian Pertambangan	20
C. Sanksi Hukum Pertambangan	21
D. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi	26
BAB III PEMBAHASAN	
A. Galian C melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	36

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Penambangan Yang Berlingung Terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru	
C. No 6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	
.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

